

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018

Untuk adanya keserasian perencanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah, arah kebijakan ekonomi harus mengacu dan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 yang berpedoman pada RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2019. Tujuannya agar terjalin sinergitas antar dokumen perencanaan serta menjalin kesinambungan perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibangun pada tahun 2018.

Prioritas Nasional dan Program Prioritas Tahun 2018 dirancang sebagai berikut :

1. Pendidikan, dengan program prioritas terdiri dari : (i) pendidikan vokasi, dan (ii) peningkatan kualitas guru.
2. Kesehatan, dengan program prioritas terdiri dari : (iii) Peningkatan kesehatan ibu dan anak, (iv) pencegahan dan penanggulangan penyakit, (v) preventif dan promotif (gerakanmasyarakat hidup sehat).
3. Perumahan dan Permukiman, dengan program prioritas terdiri dari : (vi) penyediaan perumahan layak, (vii) air bersih dan sanitasi.
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, dengan program prioritas terdiri dari : (viii) pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10), (ix) pengembangan 5 kawasan ekonomi khusus – KEK (dari 10), (x) pengembangan 3 kawasan industri – KI (dari 14), (xi) perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja, (xii) peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi.
5. Ketahanan Energi, dengan program prioritas terdiri dari : (xiii) EBT dan kawasan energi, (xiv) pemenuhan kebutuhan energi.
6. Ketahanan Pangan, dengan program prioritas terdiri dari : (xv) peningkatan produksi pangan, (xvi) pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi).
7. Penanggulangan kemiskinan, dengan program prioritas terdiri dari : (xvii) jaminan dan bantuan social tepat sasaran, (xviii) pemenuhan kebutuhan dasar, (xix) perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi.
8. Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman, dengan program prioritas terdiri dari : (xx) pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara dan inter-moda), (xxi) pengembangan telekomunikasi dan informatika.

9. Pembangunan wilayah, dengan program prioritas terdiri dari : (xxii) pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, (xxiii) pembangunan perdesaan, (xxiv) reforma agrarian, (xxv) pencegahan dan penanggulangan bencana (al. kebakaran hutan), (xxvi) percepatan pembangunan Papua.
10. Politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dengan program prioritas terdiri dari : (xxvii) penguatan pertahanan, (xxviii) stabilitas politik dan keamanan, (xxix) kepastian hukum, (xxx) reformasi birokrasi.

Rancangan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 **“Memacu Investasi dan Memantapkan Infastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dilakukan dengan pendekatan **Money Follow Program**. Pendekatan ini bertujuan agar pemerintah lebih fokus dalam membuat perencanaan. Dengan pendekatan ini dapat dipastikan setiap program prioritas dapat dilaksanakan karena jelas sumber pendanaannya.

Tema RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 **“Mendorong pertumbuhan wilayah melalui peningkatan investasi, perluasan pelayanan infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia”**. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 ini diarahkan pada 5 (lima) agenda prioritas pembangunan, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- 2) Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
- 3) Percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang;
- 4) Membangun Kehidupan Beragama dan Berbudaya;
- 5) Peningkatan Kualitas pelayanan publik dengan reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Tidore Kepulauan pada tahun **ketiga atau tahun 2018** merupakan kelanjutan dari arah kebijakan tahun sebelumnya. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrasturktur antar wilayah perlu dilanjutkan dengan peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan dasar yang merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Tema pembangunan yang diusung pada tahun ketiga pemerintahan adalah **“Peningkatan Pelayanan Dasar di Seluruh Wilayah”**. Arah kebijakan pada tahun ketiga mencakup peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan. Pelayanan Dasar dalam hal ini meliputi pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban

umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. Fokus pembangunan pada tahun ketiga adalah mengurangi ketimpangan pelayanan publik di Pulau Tidore dengan pulau-pulau lainnya. Pada tahun ketiga diharapkan pemerintah daerah sudah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pokok di bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan dasar lainnya yang menjadi keluhan sebagian besar masyarakat serta membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi dan Misi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021

Sebagai arah pembangunan dalam rangka pencapaian 5 (lima) tahun kedepan, penyusunan visi Kota Tidore kepulauan sedapat mungkin dapat menjawab permasalahan dan isu aktual serta tantangan dan peluang pembangunan daerah, sehingga **Visi** yang dirumuskan Kota Tidore kepulauan tahun 2016 – 2021 yaitu

**“ Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine”**

Dalam Visi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 terdapat tiga kata kunci yakni **Kemandirian, Kota Jasa dan Agro-Marine.**

Kemandirian mengandung makna bahwa mendayagunakan segenap asset, potensi dan kemampuan yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan.

Kota Jasa mengandung makna bahwa Kota Pulau dimana jasa menjadi sumbu utama, dalam rangka akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun nasional, memadukan wilayah pengembangan kota dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infratstruktur sistem transportasi dan sistem teknologi yang memadai, serta mengutamakan pelayanan publik yang berkualitas. dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.

Agro-Marine mengandung makna percepatan dan mengoptimalkan pembangunan dan percepatan pemanfaatan sumber daya potensial dan unggulan di darat maupun di laut yang meliputi sector perikanan, perhubungan, pariwisata, pertanian (pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Misi

1. **Memperkuat dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup**
Memaksimalkan pembangunan infrastruktur laut maupun darat untuk mendorong kelancaran proses produksi dan pemasaran secara terintegrasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. **Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta pertanian berbasis potensi unggulan wilayah**
Menciptakan sentra-sentra pusat produksi perikanan dan pertanian sesuai dengan karakteristik wilayah dengan tetap mengacu pada RTRW Kota Tidore Kepulauan
3. **Penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan geostrategi, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah**
Pembangunan ekonomi dan investasi serta memberdayakan usaha mikro kecil menengah disetiap kecamatan dan mengoptimalkan seluruh potensi Sumberdaya Alam dengan penguatan kelembagaan social ekonomi.
4. **Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis potensi unggulan daerah**
Mewujudkan pembelajaran yang memanfaatkan keunggulan lokal daerah dalam aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi, dan komunikasi, bahasa, ekologi yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan serta menambah sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan layanan masyarakat di daerah-daerah yang susah terjangkau serta menumbuhkan potensi generasi muda sebagai penerus pembangunan.
5. **Penguatan pembangunan sosial dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselarasi pembangunan**
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan serta melestarikan kebudayaan lokal agar tidak punah.
6. **Reformasi Birokrasi**
Penyelenggaraan pemerintahan di tandai dengan adanya perubahan mindset ASN, penataan kelembagaan serta perbaikan kinerja birokrasi yang bermuara pada peningkatan daya saing untuk mewujudkan *Good Governance*.

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

Visi : Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Memperkuat dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
2. Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta pertanian berbasis potensi unggulan wilayah	Produktivitas wilayah dan akses pemasaran produk kelautan/perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah yang semakin berkembang	Meningkatnya hasil produksi perikanan dan pertanian yang berbasis unggulan wilayah
3. Penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan geostrategi, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang seiring dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi berbasis pada potensi lokal
4. Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis potensi unggulan daerah	Sumber daya manusia yang semakin handal dan dapat bersaing baik secara lokal, nasional maupun internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek pembangunan yang berbasis IPTEK 2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata dengan mempertimbangkan potensi keunggulan lokal ; 3. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;
5. Penguatan pembangunan sosial & budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan	Masyarakat Tidore yang semakin sejahtera dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera dan tumbuhnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah. 2. Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan, alam dan kearifan lokal.
6. Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Good Governance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik. 3. Meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah

4.1.2 Strategi Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021

Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

a) Kekuatan-Peluang (Strategi S-O)

1. Menciptakan kondisi aman, nyaman dan kondusif keamanan di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan secara berkelanjutan dengan menggali potensi seluruh stakeholders Kota Tidore
2. Mengembangkan dan meningkatkan peran lembaga-lembaga adat untuk memperkuat sektor pariwisata
3. Membuka dan mengembangkan ruang publik dengan konsisten mengacu pada dokumen tata ruang yang telah diPerdakan
4. Mengoptimalkan pulau-pulau yang belum dimanfaatkan secara maksimal dengan cara menggali potensi pulau yang belum termanfaatkan tersebut melalui berbagai kajian potensi wilayah
5. Menjadikan Dokumen perencanaan sebagai rujukan utama landasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
6. Membangun daya saing masyarakat Kota Tidore Kepulauan khususnya para pemuda yang berbasis kearifan lokal
7. Mengurangi rentan kendali khususnya di daratan Halmahera
8. Mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan di Sofifi
9. Adanya pengalokasian anggaran khusus yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

b) Kekuatan-Ancaman (Strategi S-T)

1. Melaksanakan pembangunan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan dan lestari, Memaksimalkan potensi sumberdaya alam sesuai karakteristik wilayah
2. Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan investasi daerah
3. Meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan sesuai dengan tuntutan dunia kerja
4. Meningkatkan komoditi unggulan daerah dalam rangka persaingan pasar global

c) Kelemahan-Peluang (Strategi W-O)

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dengan dukungan stakeholders utama untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Pembangunan yang konsisten berbasis Tata Ruang Wilayah
3. Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dengan promosi secara menyeluruh baik tingkat nasional maupun regional
4. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi pelabuhan Trikora dengan dukungan dari pemerintah
5. Penempatan tenaga kesehatan secara merata di semua Kecamatan
6. Peningkatan infrastruktur sistem pendidikan yang sesuai Standar Pendidikan Nasional (SNP)
7. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggara pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan

d) Kelemahan-Ancaman (Strategi W-T)

1. Memperbanyak sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat dengan ikut serta seluruh stakeholders bencana
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam bidang perencanaan dengan pembangunan sistem informasi berbasis online
4. Mempercepat pembangunan di segala bidang yang fokus pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur
5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan serta penerapan regulasi yang tepat

Berdasarkan hal tersebut diatas berikut adalah rangkaian uraian strategi umum pembangunan Kota Tidore Kepulauan.

Lima Strategi umum atau **Panca Strategi** yang melingkupi segenap pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pembangunan tahun 2016-2021, antara lain:

Pertama; Revolusi mental

Kedua; Korelatif dan Sinergis

Ketiga; *Money follow* Program

Keempat; Inovatif dan berkelanjutan

Kelima; Kemandirian Anggaran dan Pembangunan

1) Revolusi Mental

Strategi pembangunan yang dimulai dengan revolusi mental adalah gerakan dalam membangun karakter aparatur pemerintah dan masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk berfikir kearah yang lebih baik dan bermartabat sebagai nilai-nilai dasar kehidupan. Membangun Kota Tidore Kepulauan dengan melakukan revolusi mental mulai dari diri sendiri, sehingga gerakan perubahan yang relatif lebih cepat dalam berfikir, bertindak dan bekerja dalam merespon dinamika pembangunan.

2) Korelatif dan Sinergis

Strategi pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, haruslah dilaksanakan secara korelatif dan sinergis dengan menghubungkan dan mengoptimalkan seluruh sektor dan aspek-aspek dalam pembangunan maupun program dan kegiatan pembangunan dalam pencapaian **Kota Jasa Berbasis Agro-Marine** sehingga memberikan dampak pada hasil pembangunan yang optimal pada seluruh sisi kehidupan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.

3) Money Follow Program

Strategi pembangunan dengan pendekatan *money follow* program adalah penerapan penganggaran pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada aspek pemerataan tanpa memperhatikan aspek program prioritas. Penganggaran pembangunan akan lebih fokus pada program prioritas sehingga seluruh pembangunan di Kota Tidore Kepulauan akan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat.

Agar pembangunan memiliki nilai manfaat dan hasil untuk masyarakat, maka perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a) Pembangunan tidak lagi berhenti setelah memperoleh output, akan tetapi diperlukan monitoring secara periodik sehingga pembangunan yang dilakukan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat.
- b) Manfaat yang diperoleh masyarakat tersebut harus terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan.
- c) Seluruh keluaran kegiatan pembangunan yang telah dilakukan selama ini yang belum memiliki nilai manfaat untuk masyarakat, harus didorong agar bermanfaat untuk masyarakat luas.

4) Inovatif dan Berkelanjutan

Strategi pembangunan yang bertumpu pada aspek inovatif dan berkelanjutan adalah strategi dalam menghadapi persaingan global dan perubahan cara pandang dalam tatanan kehidupan dunia. Kota Tidore Kepulauan sebagai bagian dari kehidupan dunia harus berubah dengan cara :

1. Aparatur harus didorong pada budaya perubahan, tidak lagi betah pada kondisi nyaman tanpa perubahan
2. Semua program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan harus dilakukan dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan.

Inovasi dalam pemerintah bukanlah satu kegiatan atau beberapa kegiatan yang harus didanai, tetapi inovasi dalam pemerintahan adalah penerapan dalam satu program dan kegiatan pembangunan yang disertai dengan ide-ide/gagasan yang baru dengan menginternalisasikan didalamnya energi keberlanjutan.

5) Kemandirian

Strategi pembangunan dengan bertopang pada kemandirian menekankan pada aspek daya saing dan keunggulan kompetitif serta keunggulan inovatif yang dimiliki oleh Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota dengan sumberdaya alam laut dan pertanian yang melimpah. Selain itu strategi pembangunan dengan prinsip kemandirian dilakukan untuk mewujudkan pola pembangunan yang teratur dan tertata rapi dengan tetap memperhatikan perencanaan Tata Ruang Regional dan Wilayah.

Melalui **Panca Strategi** pembangunan Kota Tidore Kepulauan diatas, diharapkan pembangunan dilakukan secara konsisten dalam mencapai Visi Kota Tidore Kepulauan.

4.1.3 Arah Kebijakan

4.1.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan 2016-2021

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan diarahkan untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan infrastruktur Kota Tidore Kepulauan baik infrastruktur laut maupun darat yang dapat menopang aktivitas perekonomian masyarakat dengan tetap berorientasi pada lingkungan yang lestari.
2. Produksi perikanan dan kelautan serta pertanian berbasis keunggulan wilayah
3. Memperkokoh kapasitas perekonomian berbasis pada potensi lokal
4. Memantapkan kualitas sumber daya manusia Tidore Kepulauan untuk mengisi jalannya pembangunan menuju Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa berbasis Agro- Marine
5. Mencapai tata kehidupan masyarakat yang seimbang didasari pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
6. Memperkokoh tiang pancang kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor pembangunan yang berorientasi melayani

4.2 Prioritas dan Pembangunan Daerah

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Pembangunan Infastruktur laut dan darat	Penyediaan infastruktur Kota Tidore Kepulauan baik infastruktur laut maupun darat
2	Perikanan, kelautan dan pertanian	Memperkokoh perikanan dan kelautan serta pertanian berbasis keunggulan wilayah
3	Perekonomian	Memperkokoh kapasitas perekonomian berbasis pada potensi local
4	Sumber daya manusia	Memantapkan kualitas sumber daya manusia
5	Nilai-nilai budaya	Mencapai tata kehidupan masyarakat yang sejahtera didasari nilai-nilai budaya dan kearifan local daerah
6	Reformasi birokrasi	Pemerintahan yang berorientasi melayani

Tabel 4.3
PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Hasil Program s/d Tahun 2018	SKPD Penanggung Jawab
1	Penyediaan infrastruktur baik infrastruktur laut maupun darat	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	KM	400,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang Turap/Bronjong dalam kondisi baik	M	8.421,23	
		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	KM	282,49	
		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang Jaringan Irigasi/DAS dalam kondisi baik	KM	6,45	
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang Drainase/Gorong-gorong dalam keadaan baik	KM	129,715	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah sarana prasarana Air Bersih yang layak minum	Unit	91	
		Program pembangunan gedung	sarana dan prasarana publik terbangun dalam kondisi baik	Unit	2846	
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang terbangun	%	50	Dinas Perhubungan
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Terpelihara secara baik	%	80	
		Program peningkatan pelayanan angkutan	presentase ketertiban dan kelancaran pengguna jasa perhubungan	%	80	
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Presentase sarana penunjang di sektor perhubungan yang terbangun secara representatif	%	75	Satpol PP
		Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kebakaran yang dapat di tanggulang	%	100	
			Tingkat ketersediaan Bak penampung Air	Buah	8	
			Tingkat ketersediaan Sumur damkar	Buah	1	
			Tingkat ketersediaan Amada Damkar	Unit	8	
			Tingkat ketersediaan Hydrant Damkar	Paket	4	
			Tingkat ketersediaan Perlengkapan Petugas Damkar	Buah	24	
		Tingkat ketersediaan Peralatan Damkar	Buah	50		
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Timbunan Sampah yang Terangkut	M ³	25.570	Dinas Lingkungan Hidup
			Tingkat ketersedianya pagar TPA	Paket	1	
Tingkat ketersediaan tempat cuci alat berat	Paket		1			
Tingkat ketersediaan Drainase TPA	Paket		1			
Tingkat ketersediaan Pelayanan Persampahan	%		60			
Tersedianya Prasarana TPA	Unit		1			
Tersedianya Jembatan timbang	Unit	1				
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau	Tingkat terciptanya lingkungan yang asri	Lokasi	2	Dinas Kelautan dan Perikanan		
2	Produksi perikanan dan kelautan serta pertanian berbasis keunggulan wilayah	Program pengelolaan sumberdaya penikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya		Ton	160
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya		Rp (1000)	190.000
			Persentase PDRB dari subsektor kelautan dan perikanan		%	10
			Jumlah produksi kelompok pembudidaya yang dibina		Ton	160
		Program pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap daerah		Rp (1000)	190.000
			Jumlah produksi perikanan tangkap dari kelompok yang dibina		Ton	17.027
			Tingkat pendapatan nelayan yang dibina		Rp	3.950.000
			Persentase PDRB sub sektor perikanan		%	10
			Jumlah konsumsi ikan per kapita per tahun		Kg	51
			Nilai produksi perikanan tangkap daerah		Rp (1000)	220.000.000
		Program penguatan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan	Jumlah produk olahan ikan yang menerapkan pengepakan/pengemasan yang baik		kelompok	2
			Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang dibina		Unit	2
		Program penataan ruang laut dan pesisir	Persentase kondisi terumbu karang sangat baik		%	2
			Luas lahan mangrove yang terjaga dan terpelihara		Ha	10.143
			Luas kawasan perairan yang ditetapkan/dicadangkan sebagai kawasan konservasi		Ha	10
			Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi		Ha	2
Program pengawasan pengelolaan SDKP	Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel dan tepat waktu	kasus	4			
Program pengelolaan pelabuhan perikanan	PAD dari sektor Kelautan dan Perikanan	Rp. (Juta)	645			

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Hasil Program s/d Tahun 2018	SKPD Penanggung Jawab
		Program pengembangan sistem distribusi dan ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan secara merata	%	65	Dinas Ketahanan Pangan
		Program pengembangan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Meningkatnya Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat	%	75	
		Program penanganan rawan pangan	Tingkat Penurunan Wilayah Rawan Pangan	%	70	
		Program sekretariat dewan ketahanan pangan	Terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan	Orang	23	
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya Data Pertanian Yang Akurat	%	100	Dinas Pertanian
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Tingkat Kematian Ternak Menurun	%	10	
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Hasil Peternakan	%	100	
		Program pengembangan agribisnis peternakan	Meningkatnya Pengelolaan Usaha Peternakan Yang Berorientasi Agribisnis	%	100	
		Program produksi dan produktifitas tanaman hortikultura, buah dan sayuran	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Tanaman Pertanian	Ha	250	
		Program penyediaan prasarana dan sarana pertanian	Tersedianya Sarana Prasarana Pertanian Yang Memadai	%	100	
		Program peningkatan produksi produktifitas dan mutu tanaman perkebunan	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan	Ha	213	
		Program pengembangan sarana dan prasarana perkebunan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkebunan Yang Memadai	Unit		Dinas Pertanian
		Program pengembangan pascapanen dan pemasaran hasil perkebunan	Tersedianya Sarana Pasca panen yang memadai	Unit	20	
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tingkat Produksi Hasil Usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	%	60	
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Prosentase penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan pada pelaku utama dan pelaku usaha	%	50	
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Tingkat intensitas pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha	Jumlah	71			
3	Memperkokoh kapasitas perekonomian berbasis pada potensi lokal	Program penciptaan iklim Usaha yang kondusif	Jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas	Jenis izin /unit	1880	Dinas Perindagkop dan UKM
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil	Jumlah	210	
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Prosentase pengembangan produktifitas KUKM	%	-	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Penurunan jumlah koperasi tidak aktif	Unit	60	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	Unit	215	
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	91	
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL terfasilitasi sarana usahanya	unit	200	
		Program pembangunan dan pengembangan kawasan perdagangan	Peningkatan ketersediaan sarana perdagangan yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan teratur	Unit	55	
		Program peningkatan perdagangan komoditi antar pulau	Peningkatan volume perdagangan antar pulau	Ton	22.132	
		program pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam	Peningkatan kondisi kesehatan KSP/USP dalam pengawasan dan pengawasan khusus menjadi kategori cukup sehat atau sehat	Unit	124	
		Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Tingkat penerapan IPTEK sistem produksi oleh IKM	Unit	513	
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah peningkatan produktifitas IKM	Unit	513	
		Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah peningkatan sentra industri potensial	Unit	1	
		program pembangunan sentra industri	Jumlah sentra industri terbangun	Unit	0	
		program pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Terbentuk dan berkembangnya BUMD	unit	1	
4	Memantapkan kualitas sumber daya manusia	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Angka Partisipasi PAUD	%	92,00	Dinas Pendidikan
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun	Lulusan Pendidikan Menengah Yang Bermutu	Nilai Rata-Rata UN	69,21	
			Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	99,53	
		Program Pendidikan Non Formal	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	%	97,92	
			Meningkatnya Angka Melek Huruf Pada Usia Produktif	%	98,19	
Program Pendidikan Luar Biasa	Tersedianya Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Khusus & Pendidikan Layanan Khusus	%	-			

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Hasil Program s/d Tahun 2018	SKPD Penanggung Jawab
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu Guru	Rata-Rata Nilai UKG	51,00	
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Manajerial Pelayanan Pendidikan	%	89	
		Program perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan	Tersedianya Akses Pendidikan yang Bermutu	Jumlah Satuan Pendidikan Sesuai Standar Sarpras	180	Dinas Pendidikan
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Pemuda	Jumlah Kegiatan Pemuda	2	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Peningkatan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Pemuda Yang Dibina	0	
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terbinanya Klub Olahraga di Kota Tidore Kepulauan	Jumlah Klub Olahraga Yang Dibina	0	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Lapangan	65	
		Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda	Jumlah Gedung	6	
		Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Tersedianya persediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	100	Dinas Kesehatan
			Cakupan puskesmas yang dibina dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer	%	100	
			Persentase sertifikasi penyuluhan pangan	%	100	
			Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi	Jumlah SIP/tahun	100	
			Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	%	100	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	%	80	
			Persentase pasien jiwa bebas pasung	%	100	
			Persentase puskesmas yang melaksanakan program UKGS sampai tahap III	%	80	
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif	%	100	
			Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM	%	100	
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan kesehatan olahraga	%	100	
			Umlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI dan kelurahan/desa	Jumlah pos UKK per tahun	20	
			Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	85	
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta	%	0	
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat	%	100	Dinas Kesehatan
			Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	26	
			Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	%	56	
			Jumlah kelurahan/desa yang melaksanakan STBM	kelurahan/desa	50	
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	
			Cakupan Penderita DBD yang ditangani	%	100	
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	per 100.000 penduduk	0	
			Cakupan Penemuan penderita pneumonia balita	%	100	
			Cakupan penemuan pasien baru TB BTA Positif	%	85	
			Cakupan penemuan penderita diare	%	100	
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular	%	38	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Hasil Program s/d Tahun 2018	SKPD Penanggung Jawab	
			Annual Paracite Index	per 1.000 penduduk	< 1		
			Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	%	95		
			Persentase kecamatan yang dieliminasi rabies	%	0		
			Persentase angka kasus HIV yang diobati	%	100		
			Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia < 18 tahun	%	5,4		
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan pelayanan sesuai standar	%	100		
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	%	100		
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	%	100		
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pelayanan ibu hamil (K4)	%	100		
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100		
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100		
			Cakupan pelayanan nifas	%	100		
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100		
			Cakupan kunjungan bayi	%	100		
			Cakupan pelayanan anak balita	%	100		
			Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100		
			Cakupan peserta KB aktif	%	80		
			Program bantuan operasional kesehatan	Persentase puskesmas yang mendapat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	%		100
		Program Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan haji	%	100		Dinas Kesehatan
		Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	100		
		Program Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasyankes	orang	330		
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Orang	30		RSD
		Program Perbaikan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur yang Memadai	Paket	10		
Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Tersedianya pemeliharaan Alat Kesehatan	unit	213				
5 Mencapai tata kehidupan masyarakat yang sejahtera didasari pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah festival dan pagelaran seni	keg	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah situs dan cagar budaya yang dipelihara	Lokasi	11			
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat cakupan kajian seni	%	0			
	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Tingkat cakupan sumber daya manusia kesenian	%	0			
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	orang	21.500			
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Tingkat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,18			
	Program Pengembangan Kemitraan	Tingkat capaian kesadaran wisata masyarakat	%	100			
	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Tingkat pelayanan PMKS dan Komunitas Adat terpencil (KAT)	%	100		
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tingkat pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	95		
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Sosial	%	95		
Program keluarga harapan		Tercapainya Keluarga Harapan	%	100			
6 Pemerintahan Yang berorientasi melayani	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Handal	%	100	Badan Kepegawaian & P SOM dan Bag. Organisasi		
	Program peningkatan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah	presentasi peningkatan penyelenggaraan pemerintah	%	100	Bag. Organisasi		
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya produk hukum daerah	%	100	Bagian Hukum dan HAM, Bag. Organisasi		
	Program peningkatan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu	%	100	Bag. Pemerintahan		